

*Selamat
Tahun Baru
2013*



PENAJAMAN DAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
KEMENTERIAN PU

REFORMASI
BIROKRASI

KERJASAMA
SEMUA PIHAK
SOLUSI BANJIR
JAKARTA

air

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR

**TINGKATKAN KUALITAS
DAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR PU**



NOVEMBER-DESEMBER 2012

Pembina
Djoko Kirmanto
Mohamad Hasan • Mudjiadi
Eko Subekti • Arie Setiadi
Moerwanto • Pitoyo Subandrio
• Imam Agus Nugroho • Hartanto

Penanggung Jawab
Leonarda Ibnu Saïd

Pemimpin Umum
Ardhyta Agus Setiawan

Pemimpin Redaksi
Tine Rosdiana

Redaksi
Trinanda S. P. S.
• Kety Fillailly • Eny Sumariyati
• Ersytra Tiara

Kontributor
Emir Faridz

Desain/Layout
M. Syaukani • Noorcholis

TU/Sekretaris
Isbandiyah

Data
Nurullia Anjani • Marsono

Foto/Dokumentasi
M. Syaukani • M. Kurdi
• Sri Bagus Herutomo

Sirkulasi
Subbag TU Bina Program

Alamat Redaksi/TU
Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Gedung Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7396616 pes. 515
Fax. (021) 7210395
e-mail: humassda@yahoo.com
humassda@gmail.com

Diterbitkan oleh
Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum



EDITORIAL

Dirgahayu Kementerian Pekerjaan Umum ke-67, dengan tema “Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Tingkatkan Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman untuk Kesejahteraan Rakyat”, kita jadikan momentum 3 Desember sebagai pemacu semangat dan pengabdian kita dalam melanjutkan tahapan pembangunan yang saat ini telah memasuki tahun ketiga dari Program Pembangunan Jangka Menengah kedua 2010-2014, serta melanjutkan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan yang sudah tidak bisa ditunda lagi.

Tanpa terasa 67 tahun kementerian pekerjaan umum mengabdikan untuk bangsa dan negara melalui penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman. Untuk bidang sumber daya air pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan kepada pembangunan saja, namun demikian operasi dan pemeliharaan serta penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pun menjadi fokus utama demi mewujudkan kemanfaatan sumber daya air berkelanjutan.

Kemeriahan perayaan hari bhakti pekerjaan umum pun tidak hanya di kantor pusat saja, balai wilayah sungai turut memeriahkan dengan berbagai aktivitasnya. Majalah Air edisi ini memotret berbagai kegiatan di balai-balai wilayah sungai. Selain itu masih banyak ragam aktivitas bidang sumber daya air yang akan di ulas di majalah air edisi akhir tahun ini.

Pada edisi akhir tahun ini, ijin kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam setahun kami berproses masih banyak kekurangan dalam menyebarkan informasi mengenai sumber daya air. Air merupakan bagian terpenting dari ekosistem, ketersediaannya diperlukan bagi semua makhluk hidup, pengelolaannya merupakan sebuah proses guna mencapai tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air yang layak konsumsi, hingga lestari lingkungannya.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat hari natal dan tahun baru, semoga di tahun 2013 diberikan kesehatan dan kesuksesan.



Banjir Kanal Barat



LAPORAN UTAMA TINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR PU

Tanggal 3 Desember bagi kita selalu memiliki makna tersendiri, karena pada tanggal inilah pada tahun 1945 telah gugur “tujuh martir” pahlawan Kementerian PU. Para pemuda pemberani tersebut dengan gigih telah mempertahankan Gedung Sate di Bandung yang menjadi pusat penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia saat itu, sekaligus menjadi simbol kedaulatan negara.



LAPORAN UTAMA DAERAH BERPRESTASI RAIH PENGHARGAAN PKPD-PU

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) merupakan salah satu wujud kegiatan pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.



LAPORAN UTAMA PENAJAMAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEMENTERIAN PU

Pada tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum meningkat menjadi Rp. 79,55 triliun kita semakin dituntut mampu dengan baik menjalankan amanah yang sudah diberikan, sehingga diharuskan untuk melakukan penajaman penyusunan program dan persiapan pelaksanaan program TA 2013.



LAPORAN KHUSUS KERJASAMA SEMUA PIHAK SOLUSI BANJIR JAKARTA

“Pada minggu terakhir bulan Desember 2012, selama 2-3 hari terjadi banjir dalam dua gelombang. Banjir pertama adalah genangan yang disebabkan hujan lokal, sehingga disimpulkan bahwa ada curah hujan lokal sangat besar. Kedua, hujan di Bogor dengan curah hujan cukup besar, yang terjadi karena penyempitan di sungai Ciliwung sehingga mengakibatkan air hujan yang melewatinya tumpah ke luar”, jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam jumpa pers dengan para wartawan, 22 Desember 2012, di Jakarta.



LAPORAN KHUSUS REFORMASI BIROKRASI

Mengingat banyaknya pembenahan yang harus dilakukan terhadap birokrasi pemerintahan yang ada saat ini, maka amanat melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan menjadi pekerjaan yang sangat besar.



FOKUS INFRASTRUKTUR PENANGANAN BANJIR JAKARTA

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang saat ini menjadi permasalahan yang selalui dihadapi Bangsa Indonesia. Setiap memasuki bulan Oktober hingga awal tahun baru Indonesia memasuki musim penghujan. Banjirpun tidak dapat terelakan..

LAPORAN UTAMA

- 4 Tingkatkan Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur PU
- 7 Daerah Berprestasi Raih Penghargaan PKPD-PU
- 9 Penajaman dan Penyusunan Program Kementerian PU

LAPORAN KHUSUS

- 11 Kerjasama Semua Pihak Solusi Banjir Jakarta
- 14 Reformasi Birokrasi

PROFIL BALAI

- 16 Balai Wilayah Sungai Sumatera IV

PROFIL INFRASTRUKTUR

- 20 Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Laut

FOKUS

- 22 Infrastruktur Penanganan Banjir Jakarta
- 26 Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Selesai Pada Tahun 2015

PERSPEKTIF

- 29 Bendungan Karian Potensi SDA di Banten

BERANDA

- 31 Sumber Daya Air untuk Dukung Pangan dan Energi Nasional
- 33 Pojok Informasi (Information Corner) Direktorat Jenderal SDA
- 35 Penanaman Pohon BBWS Sumatera VIII
- 37 Kai Bantu Pengelolaan SDA
- 39 Gallery

TINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR PU



Tanggal 3 Desember bagi kita selalu memiliki makna tersendiri, karena pada tanggal inilah pada tahun 1945 telah gugur “tujuh martir” pahlawan Kementerian PU. Para pemuda pemberani tersebut dengan gigih telah mempertahankan Gedung Sate di Bandung yang menjadi pusat penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia saat itu, sekaligus menjadi simbol kedaulatan negara. Kenangan dan penghargaan terhadap patriotism mereka, diabadikan sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Peringatan Hari Bakti Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012 dengan tema Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Tingkatkan Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman untuk Kesejahteraan Rakyat, Djoko Kirmanto mengajak seluruh jajaran ke-PU-an dan permukiman untuk melanjutkan tahapan pembangunan yang saat ini telah memasuki tahun ketiga dari Program Pembangunan Jangka Menengah Kedua 2010–2014, serta melanjutkan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.

“Pada tahun ketiga kita mempunyai agenda penting yaitu kegiatan *review* Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan menyelesaikan target yang ditetapkan dalam tahun ketiga guna pencapaian sasaran lima tahun (Renstra),” kata Djoko Kirmanto, pada upacara bendera memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-67, di Jakarta.



Review dilakukan pada pertengahan rencana jangka menengah 5 tahunan guna melihat dan mengevaluasi kembali rencana yang ditetapkan tahun 2010. Untuk itu pada tahun ketiga pembangunan jangka menengah telah banyak terjadi perubahan lingkungan strategis dan konstelasi kebijakan arah pembangunan. Konstelasi kebijakan arah pembangunan ini juga mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Direktif Presiden untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014 melalui *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Djoko menjelaskan bahwa MP3EI merupakan langkah awal yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas pembangunan manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan dayabeli saja, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.

Strategi utama yang dikedepankan dan menjadi pilar pengembangan wilayah penyelenggaraan MP3EI ini yaitu pengembangan wilayah berlandaskan potensi ekonomi setempat, penguatan konektivitas nasional yang melingkupi intra dan antar region serta penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional.

KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan atau wilayah di samping faktor kualitas lingkungan hidup, pencitraan dan masyarakat (budaya). Kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah dan efisiensi usaha.

Dalam hal daya saing global tersebut, berdasarkan laporan dari *World Economic Forum* 2011–2012 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-46 dari 142 negara, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (9,5%) merupakan penyumbang ketiga sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah praktek korupsi (15,4%) dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien (14,3%).

“Kementerian PU telah menetapkan “Peningkatan Pelayanan Publik” sebagai prioritas utama. Berbagai

peraturan dan pedoman telah kita tetapkan dengan matang untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas. Selain tuntutan masyarakat yang semakin kuat terhadap kinerja pelayanan infrastruktur, penetapan prioritas tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa infrastruktur pekerjaan umum adalah infrastruktur dasar yang sangat signifikan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari,” lanjut Djoko Kirmanto.

Agar infrastruktur pekerjaan umum ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Pekerjaan Umum menjadi syarat utama dalam melaksanakan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Untuk memberikan peningkatan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, Djoko Kirmanto berharap agar seluruh jajaran ke-PU-an untuk mewujudkan PerMen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang dibangun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kita.

Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan dapat diandalkan sebagai daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik, merupakan tantangan pembangunan infrastruktur ke depan.

Dan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya merupakan masukan bagi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dalam perencanaan tahun berikutnya, sehingga pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Maka seharusnya memberikan *multiplier-effect* antara lain bagi peningkatan perekonomian masyarakat, keselamatan di jalan dan atau bangunan lainnya, dan penataan lingkungan kawasan maupun permukiman yang lebih baik.

“Kita juga harus mengembangkan pendidikan sosial (*social education*) mengenai infrastruktur PU dan permukiman bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah, maka masyarakat akan mengenal lebih dekat tugas, peran dan fungsi PU dan permukiman,” kata Menteri Pekerjaan Umum.

Djoko Kirmanto berharap melalui bakti PU kepada masyarakat, dapat membangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat kepada seluruh jajaran ke-PU-an baik di pusat maupun di daerah. Dengan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat luas yang mendambakan pelayanan yang optimal maka akan menjadi modal utama dalam membangun infrastruktur yang andal dan bermanfaat secara berkelanjutan.

Dalam upacara bendera juga diserahkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan, Satya Lencana 10 tahun, Satya Lencana 20 tahun, Satya Lencana 30 tahun dan Satya Lencana Wirakarya. Terkait dengan Konstruksi Indonesia 2011, pada kesempatan tersebut juga diumumkan pemenang Lomba Tukang, Mandor dan Operator Alat Berat; Lomba Foto Konstruksi; dan Lomba Penulisan Media Cetak. **(tin/anj)**



DAERAH BERPRESTASI RAIH PENGHARGAAN PKPD-PU

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) merupakan salah satu wujud kegiatan pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2012 kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum. Pemberian penghargaan yang telah memasuki tahun ke-8 ini dibagi ke dalam tiga bidang yakni bidang penataan ruang, bidang pekerjaan umum (sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya), bidang pembinaan jasa konstruksi serta penghargaan khusus.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Gedung Kementerian PU, Jakarta 3 Desember 2012.

Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, pemberian penghargaan PKPD-PU merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Kementerian PU kepada pemerintah daerah. Penghargaan disamping sebagai bentuk apresiasi kepada pemda yang memiliki kinerja baik dalam pelayanan infrastruktur PU, juga bertujuan mendorong dan memotivasi pemda meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus mendapatkan gambaran mengenai kondisi pembangunan infrastruktur oleh pemda sehingga memudahkan Pemerintah melakukan koordinasi dan pembinaan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan kita semua terpacu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, memperkokoh kesatuan dan perastuan bangsa, menjaga terlaksananya pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat industri konstruksi nasional yang secara keseluruhan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.





Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Penataan Ruang di tingkat provinsi adalah Provinsi Jawa Barat (Terbaik I), Jawa Tengah (Terbaik II) dan Nusa Tenggara Barat (Terbaik III). Di tingkat Kabupaten, Kabupaten Sidoarjo (Terbaik I), Lampung Barat (Terbaik II), dan Sukoharjo (Terbaik III). Di Tingkat Kota, Kota Pekalongan (Terbaik I), Salatiga (Terbaik II), dan Bandung (Terbaik III).

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah (Terbaik I), Sulawesi Selatan (Terbaik II) dan D.I. Yogyakarta (Terbaik III). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Banyumas (Terbaik I), Lombok Barat (Terbaik II) dan Malang (Terbaik III).

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga tingkat provinsi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta (Terbaik I), Jawa Barat (Terbaik II) dan Sulawesi Selatan (Terbaik III). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sleman (Terbaik I), Bogor (Terbaik II) dan Gowa (Terbaik III). Di tingkat kota, Kota Yogyakarta (Terbaik I), Pekanbaru (Terbaik II) dan Padang (Terbaik III).

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta Karya tingkat Kota Metropolitan adalah Kota Malang (Terbaik I), Banjarmasin (Terbaik II) dan Balikpapan (Terbaik III). Di tingkat Kota Sedang/Kecil yakni Kota Probolinggo (Terbaik I), Payakumbuh (Terbaik II) dan Pekalongan (Terbaik III). Di tingkat Kabupaten, Kabupaten Karanganyar (Terbaik I), Tabanan (Terbaik II) dan Sukoharjo (Terbaik III).

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi di tingkat provinsi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta (Terbaik I) dan Jawa Tengah (Terbaik II). Di tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Ponorogo (Terbaik I), Kabupaten Kulon Progo (Terbaik II) dan Kabupaten Banjar (Terbaik III).



Sementara itu pemenang Penghargaan Khusus PKPD-PU Bidang Bina Marga adalah Kabupaten Badung dan Penghargaan Khusus untuk Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi adalah Kabupaten Gresik. **(kty/anj)**

PENAJAMAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEMENTERIAN PU



Pada tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum meningkat menjadi Rp. 79,55 triliun kita semakin dituntut mampu dengan baik menjalankan amanah yang sudah diberikan, sehingga diharuskan untuk melakukan penajaman penyusunan program dan persiapan pelaksanaan program TA 2013.

“Pada situasi global yang tidak pasti, Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sampai pada kuartal ke-2 tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4% masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia yang rata-rata hanya mencapai 3,5%. Dan tahun 2013 diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,7%–7,4% sedangkan pengangguran diharapkan dapat ditekan lagi menjadi sekitar 6,0% lebih rendah dari tahun 2012 yang mencapai 6,5%. Maka untuk menghadapi hal tersebut pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan harus

tetap didorong melalui pendekatan 4 jalur yaitu pro-pertumbuhan (*pro-growth*), pro-lapangan kerja (*pro-job*), pro-pengurangan kemiskinan (*pro-poor*) dan pro-lingkungan (*pro-environment*) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas manusia,” jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara Rapat Kerja Terbatas Wilayah Timur, Kementerian Pekerjaan Umum, 2–3 Nopember 2012, di Denpasar, Bali. Sebelumnya juga telah diadakan Rakertas Wilayah Barat, 30–31 Oktober 2012 di Jakarta.



Pro-lingkungan yang ditambahkan merupakan bentuk kesadaran dari semua pihak akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan dapat menjamin keberlanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global maka pelaksanaan 2013 akan sangat menentukan (kritis) pencapaian

PERSIAPAN TA 2013

Djoko Kirmanto mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama dan harus segera ditindaklanjuti dalam rangka persiapan pelaksanaan program TA 2013 diantaranya program dan kegiatan pada tahun 2013 agar dipersiapkan secara menyeluruh, direncanakan lebih baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh mengingat selain target fisik yang harus mencapai jumlah besar, kualitas pekerjaan juga harus diutamakan.

Mengenai pencapaian target fisik dan keuangan, harus secara hati-hati mencegah terjadinya hambatan dan masalah agar pencapaian target fisik dan target keuangan dapat berjalan sesuai yang direncanakan serta tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun yang dikhawatirkan akan berkolerasi dengan kualitas pekerjaan atau mutu konstruksi yang makin menurun.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur PU harus dilaksanakan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya serta dari target fisik maupun kemanfaatannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembangunan lintas sektor dan pengembangan wilayah.

Oleh karenanya balai dan satuan kerja yang berada paling depan dalam penyelenggaraan di lapangan, perlu selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain melalui pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah. Serta adanya kesepakatan baik anggaran, waktu dan personil, seperti dalam pembebasan lahan dan pembagian dan pembagian pekerjaan fisik.

“Dan bagi setiap balai diharapkan berkoordinasi dengan gubernur dan jajarannya di masing-masing wilayah dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan wilayah, serta pembangunan lintas sektor



sasaran pembangunan jangka menengah nasional yang akan segera berakhir pada tahun 2014 yang akan datang. Dan harus mempersiapkan 2013 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.



di daerah termasuk pekerjaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi,” kata Djoko Kirmanto.

Djoko Kirmanto meyakini bahwa dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian PU dapat mencapai target-target yang sudah berkorelasi kuat dengan dukungan terhadap pencapaian pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. *(anj-ny)*



KERJASAMA SEMUA PIHAK SOLUSI BANJIR JAKARTA

“Pada minggu terakhir bulan Desember 2012, selama 2–3 hari terjadi banjir dalam dua gelombang. Banjir pertama adalah genangan yang disebabkan hujan lokal, sehingga disimpulkan bahwa ada curah hujan lokal sangat besar. Kedua, hujan di Bogor dengan curah hujan cukup besar, yang terjadi karena penyempitan di Sungai Ciliwung sehingga mengakibatkan air hujan yang melewatinya tumpah ke luar”, jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam jumpa pers dengan para wartawan, 22 Desember 2012, di Jakarta.

Berkaitan dengan program pelaksanaan penanganan banjir di Jakarta, untuk saat ini normalisasi telah selesai dilaksanakan untuk Banjir Kanal Timur, yang dapat mengamankan 16 titik banjir dari total 78 titik banjir di Jakarta. Sementara itu, Banjir Kanal Barat, dapat mengamankan 6 titik banjir. Di tahun depan, permasalahan drainase besar di DKI Jakarta akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, sementara sungai akan menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Terkait dengan penanganan banjir Jakarta, Indonesia mendapat pinjaman dari bank dunia, yang saat ini sedang proses lelang, untuk dikerjakan pada awal tahun 2013. Pinjaman ini digunakan untuk penanganan banjir di Cengkareng Drain, Sunter Hilir, dan muara Banjir Kanal Barat serta merupakan lanjutan kegiatan Pesanggrahan Angke Sunter yang diharapkan selesai tahun 2014. Nantinya, normalisasi Kali Cipinang, Krukut dan Ciliwung diperkirakan selesai di tahun 2017. Sebagai lanjutan upaya penanganan banjir Jakarta, akan diteruskan dengan revitalisasi situ-situ dan sumur resapan. Sehingga nantinya, membangun sumur resapan di tiap rumah tinggal menjadi salah satu syarat dari setiap orang yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Mengenai kepastian penyelesaian banjir Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta telah memiliki *time frame* dan pola yang sama. “Namun, penanganan banjir tetap tidak dapat diselesaikan secara instan, paling cepat setidaknya tahun 2018”, tutur Djoko Kirmanto. Sebenarnya banyak hal yang patut diapresiasi dari pencapaian Pemerintah dalam pengurangan masalah banjir, seperti di jalan tol *airport* dan daerah Kelapa Gading.

Masalah lainnya yang dihadapi kota Jakarta berkaitan dengan penanganan banjir dan genangan adalah drainase lokal, walaupun drainase lokal bukan satu-satunya penyebab, karena penyebab dasarnya adalah permasalahan sampah. Menteri Pekerjaan Umum juga meminta bantuan semua pihak untuk turut membantu menyampaikan pesan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan kepada seluruh masyarakat. Hal lainnya adalah menghentikan penebangan hutan di daerah hulu dan menciptakan ruang terbuka hijau dimulai dari lingkungan rumah, dengan membangun taman di rumah agar air hujan dapat tetap terserap ke dalam tanah.



DAERAH RAWAN GENANGAN DKI JAKARTA



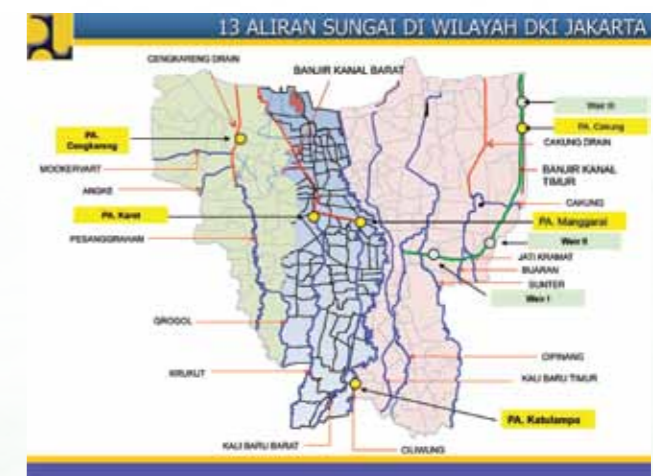
Saat ini, juga tengah dilakukan normalisasi Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung di pintu air Manggarai dan Pintu Air Karet serta Kali Ciliwung Lama. Selain itu juga dilakukan revitalisasi situ-situ di Jabodetabek dan pembangunan *Check Dam* dan sumur resapan.

“Pembangunan BKT dapat mengurangi 16 daerah rawan genangan, dan BKB mengurangi 6 daerah rawan genangan. Sedangkan, *Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JEDI) mampu mengurangi sebanyak 20 daerah genangan. Kementerian PU terus berupaya untuk dapat mengatasi banjir, khususnya DKI Jakarta. Mengingat, Jakarta mengalami banjir yang berdampak cukup besar,” ujar Moh. Hasan.

Menurut Moh. Hasan, sistem pengendalian banjir DKI Jakarta dilakukan dengan pembagian kewenangan. Kewenangan PU yakni Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemda DKI Jakarta yakni Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng dan Kali Baru Timur. (*anj/nan*)

NO	PROGRAM	STATUS	JURNAL PELAKSANAAN					REKORD DAERAH GENANGAN (TITIK)
			2012	2013	2014	2015	2017	
A	PENINGKATAN STRUKTURAL DI BAGIAN Hulu							
A.1	PENINGKATAN KAPASITAS BANJIR KANAL BARAT	SUDAH SELESAI					8	
A.2	PENINGKATAN KAPASITAS BANJIR KANAL TIMUR	SUDAH SELESAI					16	
A.3	NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN, ANGIK DAN SUNTER	DUM PELAKSANAAN					30	
A.4	REKONSTRUKSI JEMBATAN EMERGENCY (JEDI) DAN SUNTER	PROSES SELAMA					30	
A.5	NORMALISASI KALI CILIWUNG							
A.6	PINTU AIR MANGGARAI DAN PINTU AIR KARET	DUM PELAKSANAAN						
A.7	NORMALISASI KALI CILIWUNG LAMA	DUM PELAKSANAAN					2	
A.8	NORMALISASI KALI CILIWUNG (JEM. CILIBANCA)	BENCANA					1	
A.9	NORMALISASI KALI CILIWUNG (JEM. CILIBANCA) (JEM. 1 & 2) (MAYAPANG)	BENCANA					2	
A.10	NORMALISASI KALI SUNTER	BENCANA					8	
A.11	NORMALISASI KALI CIPINANG	BENCANA					8	
B	PENINGKATAN STRUKTURAL DI BAGIAN Hulu							
B.1	RENTANILAS SITU (SITU) (SITU) DI JABODETABEK	DUM PELAKSANAAN						
B.2	PENINGKATAN CHECK DAM DAN SUMUR RESAPAN	DUM PELAKSANAAN						
C	PENINGKATAN SECARA NON STRUKTURAL							
C.1	SISTEM PERINGATAN DTM							

Direktur Jenderal SDA, Kementerian PU, Moh. Hasan, menyebutkan terdapat 78 lokasi yang termasuk daerah rawan genangan di DKI Jakarta antara lain Kapuk Kamal, Cengkareng, Pondok Pinang, Jati Pulo, Pejompongan, Petogogan, Mangga Besar, Sunter dan Bukit Duri. Sebagai penanganan, PU telah melakukan peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT).



GLOSSARY:
Banjir adalah Peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat dan Aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran.

REFORMASI BIROKRASI



Mengingat banyaknya pembenahan yang harus dilakukan terhadap birokrasi pemerintahan yang ada saat ini, maka amanat melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan menjadi pekerjaan yang sangat besar.

Untuk mempermudah pelaksanaannya dan memperjelas sasaran pencapaiannya, maka tenggang waktu pencapaian sasaran hingga tahun 2025 dibagi menjadi tahapan tiap lima tahunan, menyesuaikan dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada tahun 2011 seluruh kementerian/lembaga yang diharapkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi dan pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan ditargetkan seluruh kementerian/lembaga dapat memulai proses tersebut.

“Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menegaskan bahwa pada tahun 2011 diharapkan seluruh instansi pusat berproses melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai peningkatan kinerja yang sesuai dengan indikator keberhasilan yang digariskan pada tahun 2014,” jelas Dirjen SDA, Moh. Hasan, dalam acara Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi “The Character Building Bootcamp” di lingkungan Ditjen SDA, 18 Desember 2012, di Cisarua, Jabar.

Manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi perubahan itu meliputi struktur, proses, manusia, pola pikir dan budaya kerja. Perubahan seperti reformasi birokrasi bukanlah proses yang sederhana dan akan menimbulkan resistensi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi.

“Kegiatan ini mempunyai tujuan yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yaitu mencetak tenaga-tenaga yang berfungsi menjadi sponsor perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. Sebagai insan Kementerian Pekerjaan Umum maka diharapkan sponsor perubahan dalam menjalankan fungsinya akan menjawai motto Kementerian Pekerjaan Umum yaitu bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat yaitu bertindak tepat dalam hal tepat waktu dan tepat mutu, tepat sasaran serta tepat anggaran,” ungkap Moh. Hasan

Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi juga diperluas sampai dengan ke daerah, sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Dengan sasaran pencapaian ini, maka penyebaran pemahaman dan pelaksanaan reformasi birokrasi harus sudah dilaksanakan secara serentak dan terstruktur. *(kur/tin)*





BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 251.810,71 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Terdapat 4 kabupaten dan 2 kota di provinsi yang beribukota di Tanjung Pinang yaitu:

- Kabupaten Karimun
- Kota Batam
- Kota Tanjung Pinang
- Kabupaten Natuna
- Kabupaten Bintan (dahulu bernama Kab. Kepulauan Riau)
- Kabupaten Lingga

Posisi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di sebelah selatan dan Singapura dan Provinsi Riau di sebelah barat.

Topografi daerah ini pada umumnya terdiri dari dataran rendah pada pantai bagian timur, berbukit-bukit dan pegunungan pada bagian tengah dan barat.



POTENSI DAN PRASARANA SDA BWS SUMATERA IV

SUNGAI

Wilayah sungai (WS) di Kepri terdiri dari WS Batam dan WS Bintan. WS Batam memiliki luas sebesar 10.544,35 ha yang terdiri dari 5 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Das Sei Ladi seluas 1.040,47 ha, DAS Duriangkang seluas 7.259,1 ha, DAS Muka Kuning seluas 944,50 ha, DAS Sei Harapan seluas 993,020 ha, dan DAS Nongsa seluas 212,25 ha serta DAS Sei Baloi seluas 155,32 ha.

Potensi SDA di Wilayah Sungai Batam adalah sekitar 218.092.067 m³/tahun. WS Batam yang secara geografis terletak di wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura, merupakan kawasan strategis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan sungai-sungai yang sangat terbatas jumlahnya. Pada musim hujan, air akan segera mengalir ke laut dan di beberapa wilayah terjadi banjir.

Wilayah sungai pada kepulauan Riau terdiri dari WS batam dan WS Bintan. Wilayah sungai batam dengan luas 10.544,35 ha terdiri dari:

- DAS Sei Ladi seluas 1.040,47 ha,
- DAS Duriangkang seluas 7259,1 ha,
- DAS Muka kuning seluas 944,59 ha,
- DAS Sei Harapan 993,020 ha,
- DAS Nongsa seluas 212,25 ha dan
- DAS Sei baloi 155,32 ha

Potensi SDA di WS batam yaitu sekitar 218.092.067 m³/tahun

WS Batam yang secara geografis terletak di wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura, merupakan kawasan strategis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan sungai-sungai yang sangat terbatas jumlahnya. Pada musim hujan, air akan segera mengalir ke laut dan di beberapa wilayah terjadi banjir.

Wilayah Sungai Bintan meliputi 22 DAS diantaranya adalah:

- DAS Kalangtua seluas 1080 ha = 0,35 m³/det
- DAS Matang seluas 2041 ha = 0,67 m³/det
- DAS Lekop seluas 1196 ha = 0,39 m³/det
- DAS Dompok seluas 5278 ha = 1,73 m³/det
- DAS Golangtua seluas 3701 ha = 1,21 m³/det
- DAS Gesek seluas 7567 ha = 2,48 m³/det
- DAS Jerupit seluas 1361 ha = 0,45 m³/det
- DAS Buluh seluas 2090 ha = 0,68 m³/det
- DAS Kawal seluas 8515 ha = 2,79 m³/det
- DAS Karubi seluas 1723 ha = 0,56 m³/det
- DAS Angus seluas 1896 ha = 0,62 m³/det
- DAS Kangboi seluas 6762 ha = 2,21 m³/det
- DAS Sumpat seluas 2828 ha = 0,93 m³/det
- DAS Pengundang seluas 2633 ha = 0,86 m³/det
- DAS Bintan seluas 4830 ha = 1,58 m³/det
- DAS Sribintan seluas 3510 ha = 0,86 m³/det
- DAS Engkang Anculai seluas 8009 ha = 1,97 m³/det
- DAS Lagoi seluas 2386 ha = 0,86 m³/det
- DAS Sebung seluas 3125 ha = 0,77 m³/det
- DAS Sebung Kecil seluas 1136 ha = 0,28 m³/det
- DAS Jago Bulan seluas 12262 ha = 3,02 m³/det
- DAS Mengkilo seluas 1408 ha = 0,35 m³/det

Total ketersediaan air sebesar 25,34 m³/det



EMBUNG

Berikut ini adalah table daftar prasarana yang telah dibangun di Provinsi Kepulauan Riau

NO.	WADUK	LUAS DAERAH	KAPASITAS PEMAKAIAN AIR
1	Waduk Nongsa	212,50 Ha	606.400 m ³
2	Waduk Sei Baloi	155,32 Ha	5.809,114 m ³
3	Waduk Sei Harapan	993,20 Ha	7.974,820 m ³
4	Waduk Sei Ladi	1.040,07 Ha	9.122,534 m ³
5	Waduk Muka Kuning	944,69 Ha	2.414,279 m ³
6	Waduk Duri Angkang	7.259,10 Ha	22.484,220 m ³
7	Waduk P. Bulang Lintang		5.215,938 m ³
8	Waduk Sekanak 1		
9	Waduk Sekanak 2		
10	Danau Mungga		

PROYEK YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BWS SUMATERA IV (TA 2007 – TA 2011)

1. Kegiatan Pengamanan Pantai dan Perlindungan Pulau-pulau Terdepan

NO	NAMA PROYEK	KONSTRUKSI	KETERANGAN
1	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nipah (Kota Batam)	2004–2008	Aset Pengamanan Pantai Pulau Nipah telah diserahkan oleh Menteri PU kepada Kementerian Pertahanan (zona utara) dan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (zona tengah dan selatan). Status kepemilikan aset bukan lagi di Kemen. PU.
2	Pembangunan Pengaman Pantai Pantai Karimun (Kab. Karimun)	2007–2009	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan
3	Pembangunan Pengaman Pantai Sebang perih (Kab. Bintan)	2007–2008	Pemeliharaan terakhir TA 2011
4	Pembangunan Pengaman Pantai Jagoh Dabo	2008–2011	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan *)
5	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Sekatung (kab. Natuna)	2009	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan
6	Pembangunan Pengaman Pantai Belakang Padang (Kota Batam)	2009	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan *)
7	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Laut (Kab. Natuna)	2010–2012	Saat ini masih dalam tahap konstruksi (lanjutan)
8	Pembangunan Pengaman Pantai Nongsa (Kota Batam)	2011–2012	Saat ini masih dalam tahap konstruksi (lanjutan)

2. Kegiatan Penyediaan Air Baku

NO	NAMA PROYEK	KONSTRUKSI	KETERANGAN
1	Pembangunan Penyediaan Air Baku P. Karimun (Kab. Karimun)	2008 & 2011	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan
2	Pembangunan Penyediaan Air Baku Tanjung Uban (Kab. Bintan)	2010–2011	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan *)
3	Peningkatan Tampung Air Baku Sei Pulau (Kab. Bintan)	2010–2011	Pekerjaan Peningkatan bukan pembangunan baru

3. Kegiatan Pengendalian Banjir

NO	NAMA PROYEK	KONSTRUKSI	KETERANGAN
1	Pembangunan Pengendalian banjir Batam Centre (Kota Batam)	2009 & 2011	Kondisi Saat ini Perlu pemeliharaan

4. Kegiatan Lainnya

NO	NAMA PROYEK	KONSTRUKSI	KETERANGAN
1	Pembangunan Gedung kantor BWS Sumatera IV dan Sarpras Pendukungnya (Kota Batam)	2010–2011	Dalam proses pemeliharaan
2	Pembangunan Embung Pulau Dompok (Kota Tanjung Pinang)	2011–2012	Embung Konservasi

*) Kegiatan pemeliharaan direncanakan mulai pertengahan TA 2012





PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI PULAU LAUT

Pantai Laut termasuk wilayah Kabupaten Natuna, yang merupakan kawasan perbatasan NKRI. Pulau Laut sangat perlu mendapat perhatian pemerintah karena posisinya yang sangat strategis dalam mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI. Disekitar Pulau Laut terdapat 3 pulau terluar, yaitu Pulau Sekatung, Pulau Sebetul dan Pulau Semiun.

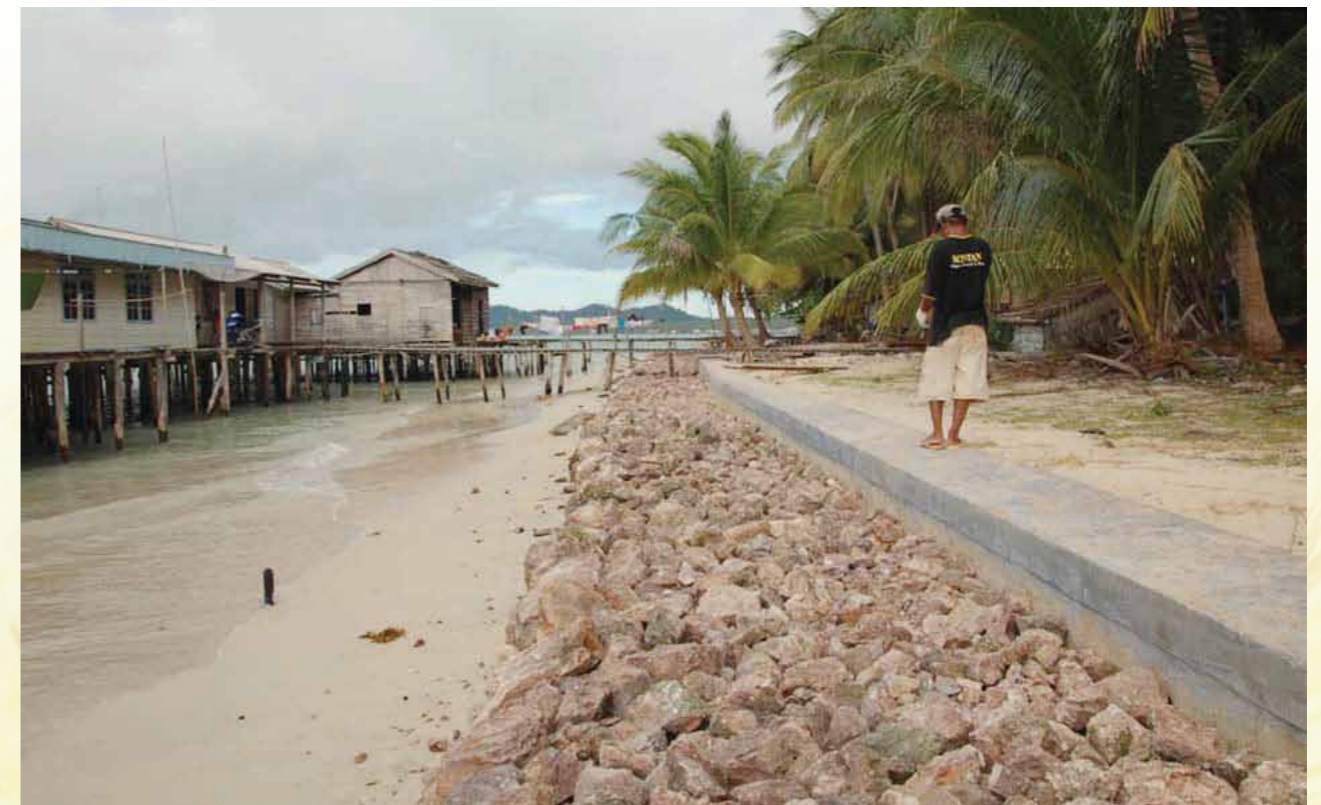
Namun, karena tidak ditemukan air baku di 3 pulau terluar tersebut, maka masyarakat Pulau Laut hanya menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai tempat mencari ikan dan tempat peristirahatan sementara sebelum kembali ke rumah-rumah mereka di Pulau Laut. Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai Pulau Laut berupa seawall (tembok laut) dari pasangan batu yang dibangun di sepanjang pantai, untuk mencegah erosi dan abrasi yang mengancam permukiman warga, jalan, dan prasarana umum lainnya.

A. Informasi Proyek

1. Lokasi : Pulau Laut, Desa Air Payang dan Desa Kador Kabupaten Natuna
2. Biaya Konstruksi : Rp 10,8 M
3. Masa Konstruksi : Tahun Anggaran 2010–2012
4. Pelaksana : SNVT PJSa – Balai Wilayah Sungai Sumatera IV

B. Data Teknis

1. Tipe Bangunan : Sea Wall dengan pasangan batu
2. Panjang Bangunan : 3 km
3. Elevasi Puncak : +2,5 m di atas MSL
4. Tinggi Gelombang : 2 m.



INFRASTRUKTUR PENANGANAN BANJIR JAKARTA

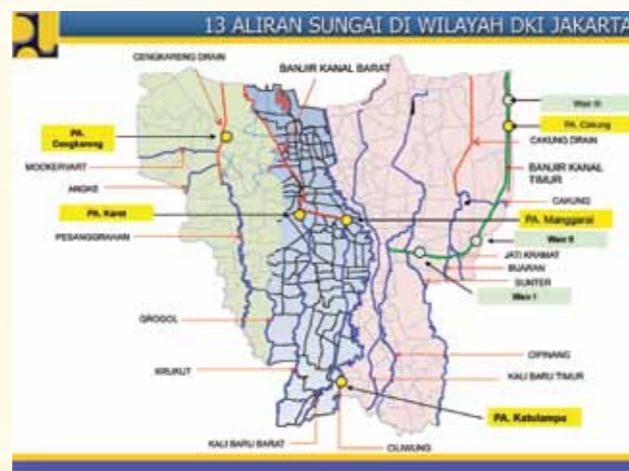


Bendungan Gintung
Lokasi : Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang saat ini menjadi permasalahan yang selalu dihadapi Bangsa Indonesia. Setiap memasuki bulan Oktober hingga awal tahun baru Indonesia memasuki musim penghujan. Banjirpun tidak dapat terelakan, di beberapa wilayah terjadi banjir yang disebabkan oleh fenomena iklim, yaitu distribusi curah hujan dalam waktu singkat dengan tingkat intensitas tertinggi atau juga menyempitnya badan sungai. Hampir setiap tahunnya juga beberapa wilayah di Indonesia terkena dampak banjir seperti wilayah Jakarta, Bandung dan beberapa kota lainnya.

Diketahui bersama banjir (fenomena iklim) diperparah dengan adanya pengalihan lahan terbuka hijau yang berubah menjadi bangunan-bangunan bertingkat tinggi sehingga menyebabkan air tidak dapat menyerap dan gorong-gorong yang penuh dengan sampah dan juga sedimentasi. Layaknya sebuah kota besar diharuskan 20 persennya merupakan lahan terbuka hijau yang terawat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun beberapa infrastruktur penanganan banjir seperti Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur dan melakukan normalisasi di beberapa Kali yang ada di Jakarta seperti Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Ciliwung Lama dan Kali Sunter serta penambahan daun pintu air Manggarai dan pintu air Karet.



BANJIR KANAL BARAT (BKB)

Infrastruktur Banjir Kanal Barat (BKB) bertujuan untuk melindungi kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan luas 7.500 ha dari luapan Kali Krukut, Kali Cideng, Kali Kalibaru Barat dan Kali Ciliwung. Manfaat dari BKB adalah terkendalinya banjir di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, sarana konservasi air dan sarana transportasi air (*water way*).

Pada tahun 2007–2009 telah diselesaikan Peningkatan Kapasitas dan Perkuatan Tebing BKB sepanjang 14,8 km dari Pintu Air Manggarai sampai dengan jembatan Pantai Indah Kapuk. Pada tahun 2009 peningkatan kapasitas alir di BKB dari 330 m³/det meningkat menjadi 507 m³/det di Pintu Air Manggarai. Dengan adanya BKB dapat mengurangi beberapa titik genangan air yang ada di Jakarta sebanyak 6 lokasi.



BANJIR KANAL TIMUR (BKT)

Setelah sukses dengan BKB pemerintah kemudian mulai melaksanakan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang sudah direncanakan sejak tahun 1973 dalam *Master Plan* Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Jakarta.

BKT menampung air dari lima aliran kali, yaitu Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung. Untuk wilayah yang dilalui oleh BKT ada 13 kelurahan, yaitu Cipinang Besar, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Malaka Jaya, Malaka Sari, Pondok Kopi, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Cakung Timur, Rorotan dan Marunda.

Panjang dari Kanal BKT adalah 23,5 km, lebar kanal 100–200–300 m dengan kedalaman saluran 3–7 m. Untuk debit rencana Q 100 yang berasal dari Daerah Hulu 290 m/det dan dari Daerah Hilir 390 m/det, realisasi sampai dengan tahun 2009 23,5 km.

Tujuan dari pembangunan BKT adalah melindungi kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 160 km² dari luapan Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung, melayani sistem drainase seluas 207 km² (*catchment area*) dan melindungi kawasan rawan genangan.

Manfaat BKT adalah terkendalinya banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sarana konservasi air dan sarana transportasi (*water way*). Dengan adanya BKT dapat mengurangi genangan air di 16 titik di wilayah Ibukota.



NORMALISASI KALI ANGKE HULU

Normalisasi Kali Angke yang akan dilaksanakan sejak tahun 2011–2014. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke 255 km², panjang sungai utama (L) 101 km, Kali Angke memiliki kapasitas *existing* alur (hulu) 16 m³/det.

Sesuai rencana total panjang pekerjaan Kali Angke Hulu sepanjang 20 km. panjang Paket I 11.425 dengan Lebar Atas Saluran 37.00 m, Lebar Bawah Saluran 12.00 m dengan Lebar Jalan Inspeksi 8.00 m untuk Tinggi Muka Air Banjir 5.75 m.

Untuk Panjang Paket 2 sepanjang 8.575 km, untuk Lebar Atas Saluran 27.00 m, Lebar Bawah Saluran 12.00 m, Lebar Jalan Inspeksi 8.00 m dengan Tinggi Muka Air Banjir 4.67 m.

NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN

Kali Pesanggrahan memiliki Luas DAS 142.1 km² dengan Luas DAS bagian hulunya 67,5 km². Panjang sungai utama (L) 66,7 km, Kali Pesanggrahan memiliki kapasitas *existing* Alur 30 m³/det (*Existing Minimal*).

Kali Pesanggrahan Debit banjir Rencana (Q50), hulu Kali Pesanggrahan berada di Pegunungan Salak (Bogor). Rencana pekerjaan Kali Pesanggrahan masuk pada Tahun Anggaran 2011–2014. Total panjang dari pekerjaan Kali Pesanggrahan 26.740 km, pekerjaan Kali Pesanggrahan dibagi menjadi tiga paket.

Pesanggrahan paket 1 sepanjang 7.750 km dengan Lebar Atas Saluran 40.00 m, Lebar Bawah Saluran 20.00 m, Lebar Jalan Inspeksi 12.50 m dan Tinggi Muka Air banjir 4.5 m. Pesanggrahan paket 2 memiliki panjang 7.730 km dengan Lebar Atas Saluran 35.00 m, Lebar Bawah Saluran 20.00 m, Lebar Jalan Inspeksi 12.50 m dengan Tinggi Muka Air Banjir 4.1 m. Untuk paket 3 sepanjang 11.260 km dengan Lebar Atas Saluran 30.00 m, Lebar Bawah Saluran 20.00 m, Lebar Jalan Inspeksi 12.50 m, sedangkan untuk Tinggi Muka Air Banjir 3.6 m.

NORMALISASI KALI SUNTER

Kali Sunter adalah salah satu kali yang akan di normalisasikan guna mengurangi genangan di kawasan tersebut. Luas DAS Kali Sunter 73.1 km² dengan Panjang Sungai Utama (L) 37 km, kapasitas *existing* alur dari Kali Sunter 11–28 m³/det. Debit Banjir Rencana Q25, hulu dari Kali Sunter berada di Kelurahan Cimpaeun Kota Depok.

Total rencana pekerjaan normalisasi Kali Sunter yang memiliki panjang 18.75 km dikerjakan dengan dua paket selama Tahun Anggaran 2011–2014. Paket Sunter 1 12.45 km dengan Lebar Atas Saluran 20.00 m, Lebar Bawah Saluran 20.00 m, Lebar Jalan Inspeksi 7.50 m dengan Tinggi Muka Air Banjir 3.30 m.

Paket Sunter 2 dengan panjang 6.30 km Lebar Atas Saluran 15.00 m, Lebar Bawah Saluran 15.00 m, Lebar Jalan inspeksi 7.50 m dan Tinggi Muka Air Banjir 3.12 m.



NORMALISASI KALI CILIWUNG LAMA

Rencana normalisasi Kali Ciliwung akan dilakukan mulai dari Pintu Air (PA) Manggarai sampai dengan Jembatan TB Simatupang 18.98 km. Kali Ciliwung memiliki luas DAS 337 km², dengan kapasitas sungai *eksisting* 195 m³/det, debit rencana Q (50) m. perkuat tebing sungai dengan turap Beton.

EAST PUMP PLUIT

Stasiun Pompa Pluit Timur dibangun pada tahun 1963 dan pada tahun 2009 yang lalu berhenti beroperasi karena terjadi *piping*. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 akan dilaksanakan pekerjaan rekonstruksi Stasiun Pompa Timur yang diganti oleh Pemerintah Jepang, yaitu *Japan International Cooperation Agency* (JICA) melalui dana *Grant Aid*.

40 persen wilayah Jakarta berada dibawah permukaan air laut, maka keberadaan *polder*, *reservoir* dan pompa diharapkan dapat melayani drainase di wilayah Jakarta. Stasiun Pompa Pluit merupakan salah satu stasiun penting untuk pengendalian banjir di wilayah Jakarta.

Dengan luas *catchment area* 34 km² Stasiun Pompa Pluit dapat melindungi sebagian besar wilayah Jakarta dari risiko banjir. Tujuan dari pembangunan proyek ini adalah merekonstruksi Stasiun Pompa Timur dan memasang pompa baru yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya, sehingga Pompa Timur dapat kembali berfungsi. Maksud dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pompa Pluit secara keseluruhan sehingga kembali memenuhi *design capacity*.

Lingkup pekerjaan utama dari proyek ini adalah rekonstruksi stasiun pompa timur Pluit, pemasangan 3 pompa baru dengan kapasitas masing-masing 5 m³/det, lengkap dengan fasilitas pendukungnya, serta pembangunan tanggul laut di depan stasiun pompa Pluit.

Diharapkan dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti BKB, BKT dan melaksanakan normalisasi di beberapa kali yang ada di Jakarta, dapat mengurangi risiko banjir yang ada di Ibukota. Tentu saja hal tersebut harus dapat didukung dari masyarakat sendiri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. (**tim**)

GLOSSARY:

Sedimentasi adalah Penumpukan suatu material atau sedimen oleh media air yang mengakibatkan berkurangnya jarak antara permukaan air dengan permukaan sedimen itu sendiri.

Polder adalah Cekungan tanah alami atau kolam buatan yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, tinggi rendah air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dan pada induk parit terdapat mesin pompa untuk membuang air yang berlebihan



PENYUSUNAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SELESAI PADA TAHUN 2015

Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Pengelolaan sumber daya air ini merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola merupakan perencanaan strategis, penyusunan pola tentu saja melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai, sehingga kerangka dasarnya yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait. Namun demikian tidaklah mudah merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air tersebut, untuk itulah perlu dicarikan jalan keluar bersama.

“Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, ada tugas yang harus segera diselesaikan, yaitu pada tahun 2015 seluruh pola pengelolaan wilayah sungai sejumlah 131 wilayah sungai selesai terumuskan sesuai kewenangannya, hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama dan pemahaman bersama antara seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan pola dan rencana tersebut” Jelas Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air dalam arahannya pada acara *Workshop* Evaluasi Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, 12 November 2012, di Bandung.



Tujuan utama dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air adalah keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri. Ketahanan air atau water security adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi.

“Untuk mencapai tujuan water security, food security, hingga energy security, maka pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan untuk peningkatan kapasitas teknisnya, selain itu penguatan kelembagaan melalui wadah koordinasi atau TKPSDA pun perlu mendapat perhatian, serta tidak melupakan pembiayaan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan” lanjut Arie Setiadi Moerwanto

Dari 131 wilayah sungai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2012 sampai dengan tahun 2012, 13 pola pengelolaan sumber daya air telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat, sementara itu 29 pola pengelolaan sumber daya air telah ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah sungai kewenangan propinsi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pemerhati bidang sumber daya air, para senior dan sesepuh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, hingga para peserta dari Balai Wilayah Sungai. **(anj/eny)**

IWRM BUKAN TUJUAN AKHIR



Jawa dan Bali menjadi zona yang memiliki kualitas dan kuantitas ketersediaan air yang buruk pada standar baku kualitas air. Ini terjadi karena jumlah makhluk hidup dan aktivitas kehidupan lebih banyak dibandingkan pulau yang lain.

Untuk itu diperlukan IWRM atau Integrated Water Resources Management sesuai dengan amanat dari UU No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, menjelaskan bahwa sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan kemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.

“Namun harus digarisbawahi IWRM bukan merupakan tujuan akhir karena merupakan suatu proses yang memiliki beberapa tujuan antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air yang berkualitas untuk dikonsumsi (*water security*) dengan tetap menjaga lingkungan yang merupakan awal dari terciptanya air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai,” ungkap Moh. Hasan

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah lama dan akan terus menerapkan pola keterpaduan dalam manajemen sumber daya air dengan tujuan ketersediaan dan keberlangsungan SDA dengan terus meningkatkan kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam berkoordinasi. Melalui wadah koordinasi yang mengacu pada beberapa peraturan, di antaranya yaitu PP No. 42 tentang Pengelolaan SDA, Keppres No. 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai dan Perpres No. 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional SDA.

Pada Perpres Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, bahwa kebijakan nasional yang dimaksudkan antara lain berupa kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air, kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pengendalian daya rusak air dan dampak yang ditimbulkan.

“Kebijakan Nasional yang dimaksud antara lain berupa kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air, kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pengendalian daya rusak air dan dampak yang ditimbulkan,” jelas Moh. Hasan.

Untuk itu dengan menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA harus memprioritaskan keterkaitan antara sumber daya air, pangan, energi untuk kepentingan nasional demi pertumbuhan ekonomi, menjaga ketahanan pangan nasional dan keamanan kebutuhan energi nasional. Diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten turut berperan aktif dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan air sesuai kewenangannya. **(ard/tin)**

GLOSSARY:

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².



BENDUNGAN KARIAN POTENSI SDA DI BANTEN

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, sejumlah pembangunan perumahan, kawasan industri yang sedang berjalan, urbanisasi dan industrialisasi di daerah Jabotabek menyebabkan kenaikan kebutuhan air untuk perkotaan dan industri secara cepat. Pengambilan air tanah yang berlebihan juga telah menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut terutama di Pantai Utara Jawa.

Pembangunan Bendungan Karian merupakan hasil studi komprehensif pengembangan sumber daya air di sekitar Jabotabek yang berakhir di tahun 1989 dan menghasilkan studi pengembangan sungai Ciujung-Cidurian pada tahun 1993-1995. Dari hasil studi tersebut, yang bernama *Study on Ciujung-Cidurian Integrated Water Resources*, merekomendasikan pembangunan secara

bertahap 4 (empat) buah bendungan yaitu Karian, Pasir Kopo, Cilawang, Tanjung, dan saluran pembawa *Karian Serpong Conveyance System* (KSCS), dengan panjang 36,5 km yang menghubungkan Bendungan Karian melalui terowongan Ciuyah ke pengolahan penjernihan air di Parungpanjang.



Setelah itu, pada tahun 2004 hingga 2006, dilakukan bantuan teknik melalui Republik Korea dalam penyusunan detail desain untuk Bendungan Karian dan saluran pembawa Karian-Serpong.

Menindaklanjuti detail desain yang telah ada, maka dilaksanakan penandatanganan kontrak konsultan supervisi pembangunan Bendung Karian, 21 Desember 2012, di Jakarta. Penandatanganan kontrak ini dilakukan antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan *Korea Rural Community Corporation* (KRC) dengan Konsorsium Korea Engineering Consultants Corporation, PT Indra Karya, PT Wiratman, dan PT Mettana.

Bendungan Karian ditujukan sebagai upaya memasok air baku untuk perkotaan dan industri di kota dan kabupaten Tangerang, Banten dengan besaran 9,1 m³/det. Sasaran lainnya adalah sebagai pasokan tambahan air baku untuk perkotaan dan industri di kota Serang dan Cilegon serta menambah air irigasi di daerah irigasi (DI) Ciujung sebesar 5,5 m³/det.



Turut menghadiri penandatanganan kontrak tersebut adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air, para eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala BBWS Cidanau–Ciujung–Cidurian, dan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Cidanau–Ciujung–Cidurian, serta PPK Karian Dam Project. Di pihak lainnya antara lain adalah *Counselor of Infrastructure Korea Embassy, Country Director of EDCF Korea Exim Bank*, jajaran direksi KRC, PT Indra Karya, PT Wiratman, dan PT Mettana.

Nantinya, pelaksanaan pembangunan bendungan Karian ini meliputi 3 kabupaten dan 3 kota di provinsi Banten. Bendungan Karian berlokasi di kabupaten Lebak, yang merupakan salah satu potensi sumber daya air yang layak untuk dikembangkan di Provinsi Banten. *(anj/eny)*

GLOSSARY:

Air Baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Bendungan adalah setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Daerah Irigasi adalah Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Intrusi Air Laut adalah perembesan air laut ke dalam lapisan tanah yang menuju ke daratan, sehingga terjadi pencampuran air laut dengan air tanah.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.



SUMBER DAYA AIR UNTUK DUKUNG PANGAN DAN ENERGI NASIONAL

HATHI sebagai organisasi profesi di bidang sumber daya air untuk ikut merumuskan konsep ketahanan air secara lebih terukur. Ketahanan air atau *Water Resilience* adalah syarat penting untuk mengukur daya dukung sumber daya air terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang dipacu pemerintah.

Tenaga profesional yang dimiliki HATHI mampu mendukung perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air. HATHI dapat berperan untuk memimpin regenerasi tenaga-tenaga profesional dalam bidang pengelolaan sumber daya air untuk masa akan datang.

Untuk itu, tahun 2012 HATHI melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, yang dimulai dengan

penandatanganan oleh Ketua Umum HATHI dan Rektor dari tujuh universitas yakni, Universitas Diponegoro, Universitas Parahyangan, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Nasional, Universitas Gunadarma dan Universitas Ahmad Yani (Unjani) Bandung. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi dan kualitas sumber daya manusia di bidang pengairan.



Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Direktur Jenderal SDA, Moh. Hasan, dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-29, 19–20 Oktober 2012, di Bandung, Jawa Barat, menyatakan bahwa pemikiran dan masukan dari peserta HATHI dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan kerap diperlukan sebagai solusi menghadapi kendala dan tantangan pengelolaan SDA saat ini. Oleh karena itu, Moh. Hasan menyambut positif tema HATHI “Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi”.

“Tenaga profesional yang dimiliki HATHI mampu mendukung perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air. HATHI dapat berperan untuk memimpin regenerasi tenaga-tenaga profesional dalam bidang pengelolaan sumber daya air untuk masa akan datang,” jelas Moh. Hasan.

Sementara itu Ketua HATHI Bandung, Iwan Hadihardaja menyatakan bahwa perhatian utama HATHI tahun ini adalah *water and security*, dalam sumber daya air dalam upaya mengatasi krisis energi, salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Hal ini disebabkan karena salah satu indikator miskin di suatu negara adalah kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan listrik, dalam hal ini Indonesia masih kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan energi listrik bagi rakyat.



Dalam upaya memberikan dukungan terhadap gerakan cinta air, dilaksanakan lomba foto dengan tema “Air untuk Sumber Kehidupanku” yang dibagi ke dalam kategori siswa SMP dan SMU dan umum. Hal lainnya adalah peresmian sistem *database* HATHI untuk mendukung sertifikasi keanggotaan HATHI dan sebagai wahana informasi yang didukung oleh Universitas Gunadarma.

Dalam sambutan Ketua Umum HATHI, Moch. Amron, menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2006–2010 menuliskan bahwa irigasi memiliki kontribusi $\pm 85\%$ terhadap total produksi padi nasional TA 2009 dan 2010. Beberapa potensi bidang sumber daya air yang dapat dikembangkan antara lain dapat berupa revitalisasi situ-situ yang sudah ada, kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk yang dapat dialihkan kepada pihak swasta dan situ-situ yang ada dapat berpotensi untuk digunakan sebagai *rest area*. Oleh karena itu di masa mendatang diperlukan ketersediaan potensi *research*, rekayasa *engineering*, potensi kebutuhan ahli teknik hidraulika, untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya air di Indonesia.



Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI 2012, dihadiri oleh 597 anggota, dan merupakan rekor peserta terbanyak yang hadir. Untuk tahun depan, kegiatan HATHI akan dilaksanakan di Yogyakarta, yang sekaligus merupakan seminar internasional dan kongres HATHI. *(nan/ech/kur)*



Pojok Informasi (*information corner*) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) merupakan media luar ruang yang dibangun untuk menyebarluaskan informasi dan dokumentasi hasil-hasil pembangunan Ditjen SDA. Selain itu, bertujuan untuk melayani kebutuhan informasi publik baik dari internal Kementerian Pekerjaan Umum maupun eksternal Kementerian Pekerjaan Umum serta menciptakan interaksi antara Ditjen SDA dengan publiknya.

Bertempat di sisi kanan lobby Gedung Ditjen SDA dan Penataan Ruang, *information corner* berbentuk $\frac{1}{4}$ lingkaran dengan luas 36 m². *Information corner* Ditjen SDA ini mengusung konsep desain modern bernuansa warna biru dan putih untuk menghilangkan kesan kaku di mata publik.





Beberapa komponen yang terdapat di dalamnya antara lain latar belakang gambar air untuk menunjukkan identitas Direktorat Jenderal SDA yang bergerak dalam bidang sumber daya air; poster-poster yang menampilkan materi kondisi dan pemanfaatan air secara umum serta hasil-hasil pembangunan Ditjen SDA, khususnya yang diresmikan pada tahun 2012; *leaflet* dan Majalah Air yang merupakan media cetak Ditjen SDA; serta *display* produk-produk kehumasan seperti buku dan *merchandise*.

Selain dibuat untuk melayani kebutuhan informasi, *information corner* ini juga diharapkan dapat menjadi *meeting point* bagi para tamu atau pengunjung gedung Ditjen SDA. (ech)



PENANAMAN POHON BBWS SUMATERA VIII

Setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum memperingati Hari Bhakti Kementerian Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan acara penanaman pohon dalam rangka Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-67 yang bertemakan Kita Wujudkan Pelestarian Dengan Penanaman Pohon Lindung di Danau Ranau, 10 November 2012, di Oku Selatan, Palembang, Sumatera Selatan.

“Penanaman pohon adalah salah satu cara terbaik dalam menanggulangi bencana erosi, banjir dan juga pemanasan global, kawasan Oku Selatan adalah salah satu paru-paru dari Sulawesi Selatan yang hutan lindungnya masih dilindungi,” ujar Bistok Simanjuntak.

Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia satu orang satu pohon, hal tersebut dikarenakan satu pohon yang ditanam selama satu tahun dapat berproduksi selama 20 tahun dapat menyerap karbondioksida yang ada di udara dan pohon juga dapat menyejukkan sehingga udara di sekitar bersih.



Secara nasional *catchment area* dari Danau Ranau adalah 580 km², jadi jumlah daerah tangkapan air sampai saat ini untuk Danau Ranau sekitar 508 tangkapan air yang masuk ke Danau Ranau dan perlu diperhatikan dan dijaga.

Bistok Simanjuntak menghimbau bahwa Danau Ranau adalah danau alam yang harus dikelola dan dilestarikan dengan baik. Karena Danau Ranau adalah salah satu sumber air yang mengalirkan airnya ke daerah persawahan di Oku Timur dan Oki. (*ard-anj*)



KAI BANTU PENGELOLAAN SDA

“Kemitraan Air Indonesia (KAI) melaksanakan kegiatan acara *National Workshop* yang bertujuan untuk memberi masukan dan finalisasi dari *Country Report on Water Resources Management Financing* yang sudah disusun oleh Konsultan Nasional, yang selanjutnya *Country Report* akan menjadi landasan yang kuat bagi negara-negara di ASEAN untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air,” jelas Moch. Amron dalam acara *Workshop Integrated Water Resources Management (IWRM) Water Financing*, 28 Desember 2012, di Jakarta.

Peran KAI adalah salah satu kumpulan *stakeholder* yang bergerak pada bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang terdiri dari Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan SDA. KAI juga dapat memberikan masukan-masukan mengenai pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia.

Kegiatan *National Workshop* dilakukan untuk mengetahui peran dari para *stakeholder* dalam memberikan masukan yang terkait dengan bidang SDA mengenai infrastruktur yang ada dan mengenai masalah Operasi dan Pemeliharaan yang ada di Indonesia.



Moh. Amron menjelaskan infrastruktur yang ada di Indonesia umurnya sudah dibangun sejak zaman Belanda dan harus dilakukan pengecekan kembali terhadap bangunannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta agar pelayanan terhadap masyarakat dalam menyalurkan air baku dapat berjalan dengan baik.

Untuk saat ini IWRM di Indonesia sudah meningkat ke *level* yang lebih baik seiring dengan perkembangan teknologi serta adanya Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang artinya dalam pelaksanaannya sudah melampaui negara-negara Asia Tenggara.

Moch. Amron berharap untuk ke depannya dapat melakukan peningkatan dari sisi kelembagaan sehingga dalam menjalankan perannya dapat dilihat kembali apakah sesuai dengan fungsinya atau tidak dan permasalahan data pengelolaan SDA yang perlu diperbaiki. **(anj)**



HARI BAKTI PU



MALAM KILAS BALIK



PKPD PU



TANAM POHON IBU NEGARA

